

Evaluasi Program Monitoring dan Evaluasi Aplikasi ABK 2023 pada Jabatan Pengelola Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Program Evaluation of Monitoring and Evaluation of ABK 2023 Application in the Program dan Activity Manager Position at Surabaya City National Unity and Politics Agency

Andini Irmadianis¹, Weni Rosdiana²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: andini.20096@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Program monitoring dan evaluasi analisis beban kerja pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya ditemukan beberapa permasalahan seperti adanya tupoksi yang belum terwadahi dalam monev ABK, pemonev yang mengalami kesulitan dalam melakukan validasi capaian, dan bukti capaian dipakai berulang pada bukti capaian tupoksi lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai evaluasi program monev di jabatan Pengelola Program dan Kegiatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dan Bagian Organisasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program monev dilaksanakan berdasarkan peraturan yang jelas. Tersedianya infrastruktur pendukung seperti sumber daya manusia, anggaran dana, dan sarana prasarana menjadi pendukung dalam optimalnya program monev. Dalam sosialisasi yang dilakukan pegawai dengan Bagian Umum dan Kepegawaian masih belum berjalan secara maksimal, namun dengan adanya aplikasi yang telah berbasis website memudahkan pegawai dalam mengisi monev. Hasil dari monev ABK ialah berupa data dukung yang telah menunjukkan hasil yang baik, dimana sudah benar dan sesuai dengan data capaian dan uraian tugas. Hasil monev tersebut akan digunakan untuk melihat validitas hasil isian ABK, gambaran kondisi riil kebutuhan pegawai, dan sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian SKP dan e-Performance. Dampak positif dari program monev ABK ialah mendeteksi dini permasalahan terkait ABK sehingga dapat dilakukan perbaikan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan meliputi ketidakseimbangan beban kerja dan beban administratif yang tinggi. **Kata Kunci:** Evaluasi Program; Monitoring dan Evaluasi; Analisis Beban Kerja

Abstract

The monitoring and evaluation program of workload analysis in the position of Program and Activity Manager at the Surabaya City National Unity and Politics Agency found several problems such as the existence of duties and functions that have not been accommodated in the ABK monitoring and evaluation, the monitor and evaluator who has difficulty in validating achievements, and evidence of achievements is used repeatedly in evidence of achievements of other duties and functions. This study aims to analyze the evaluation of the monitoring and evaluation program in the position of Program and Activity Manager. This study is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and documentation. The study was conducted at the Surabaya City National Unity and Politics Agency and the Organizational Section. Data analysis was carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the monitoring and evaluation program was implemented based on clear regulations. The availability of supporting infrastructure such as human resources, budget funds, and facilities and infrastructure support the optimal monitoring and evaluation program. In the socialization carried out by employees with the General and Personnel Section, it has not been running optimally, but with the existence of a website-based application, it is easier for employees to fill out the monitoring and evaluation. The results of the ABK monitoring and evaluation are in the form of supporting data that has shown good results, which are correct and in accordance with the achievement data and job descriptions. The results of the monitoring and evaluation will be used to see the validity of the ABK filling results, a picture of the real conditions of employee needs, and as a consideration for the assessment of SKP and e-Performance. The positive impact of the ABK monitoring and evaluation program is to detect early problems related to ABK so that improvements can be made. While the negative impacts that arise include an imbalance in workload and high administrative burden.

Keywords: Program Evaluation; Monitoring and Evaluation; Workload Analysis

Pendahuluan

Pada proses pelaksanaan institusi pemerintahan terdapat sumber daya manusia yang berperan penting untuk keberlangsungan organisasi guna menghasilkan produktivitas kerja sehingga dapat berjalan berkesinambungan. Sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dari bagaimana usaha seorang manajer sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Pemilihan model manajemen sumber daya manusia yang tepat dalam mengelola sebuah organisasi diharapkan dapat menciptakan efektifitas serta efisiensi kerja (Masram, 2015). Salah satunya yaitu melalui perencanaan kebutuhan pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas yang dilakukan melalui pelaksanaan analisis beban kerja (ABK).

Analisis Beban Kerja merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang didasarkan pada volume dan beban kerja (Arischa, 2019). Analisa beban kerja memiliki prinsip "*The right man in the right place and the right man behind the right job*" (Hasibuan, 2016). Dengan demikian analisis kebutuhan pegawai mempunyai sasaran utama untuk menghadapi permasalahan menimbunnya jumlah pegawai pada satu unit kerja dengan status pekerjaan yang tidak jelas dan kurangnya pegawai pada unit lain, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan ABK tersebut.

Dalam prakteknya penyelesaian masalah harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, sehingga pemerintah dan aparaturnya dapat membuat sebuah kebijakan yang tepat. Dalam kebijakan terdapat instrumen yang disebut dengan program, sesuai dengan yang termuat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Tayibnaxis (dalam Dzulqarnain, 2022) mengemukakan bahwa program merupakan segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan ada akibat atau hasil. Dalam menciptakan suatu program diperlukan sarana pendukung untuk mencapai tujuan kebijakan, hal ini dijelaskan oleh A. Hoogerwerf yaitu sarana dapat diuraikan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan untuk memperlancar terwujudnya kebijakan. Sarana yang dimaksud dapat berupa aturan hukum karena aturan hukum digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Diperlukan suatu kebijakan di tingkat pemerintah yaitu adanya ketentuan bahwa setiap instansi harus melakukan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Turunnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang disebutkan pada pasal 23 bahwa Bagian Organisasi sebagai Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan penyusunan/review Analisis Beban Kerja. Dengan adanya peraturan tersebut Bagian Organisasi melakukan kegiatan monev analisis beban kerja melalui aplikasi ABK 2023 di perangkat daerah kota Surabaya, salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Namun dalam program monev ABK ditemukan beberapa permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya khususnya pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan. Permasalahan yang ditemui ialah terdapat tupoksi yang masih belum terwadahi dalam monev ABK seperti membuat laporan yang dilakukan per tahun. Pekerjaan ini dilakukan oleh pegawai namun tidak tercantum dalam uraian tugas di monev ABK sehingga data dukung yang diunggah tidak sesuai. Adapun temuan monev pada aplikasi ABK sebagai berikut.

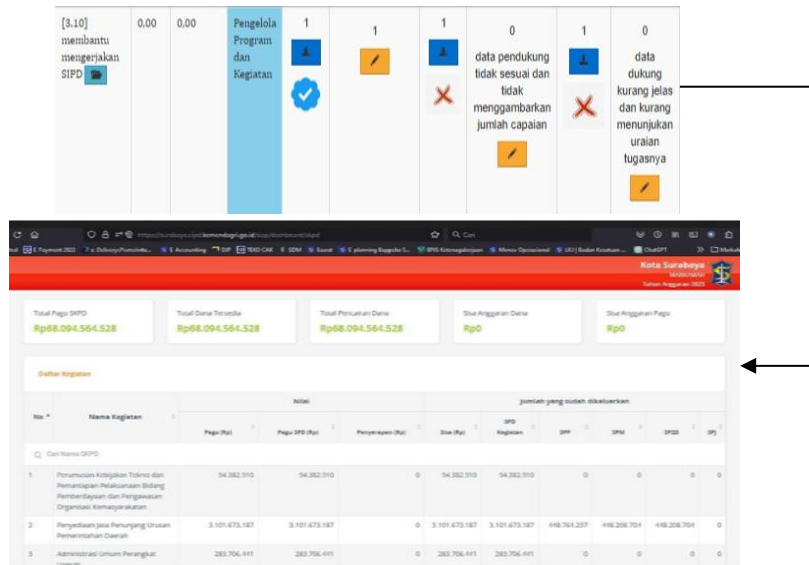
Gambar 1 Contoh Temuan Monev Terkait ABK

Item ID	Description	Status	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	Support Data	
2	pelembagaan/koordinasi penyelenggaraan tugas pokok bidang	021	020	021	Profilok Program dan Kegiatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pelembagaan penyelenggaraan	031	030	032	Profilok Program dan Kegiatan	2	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3	pelembagaan penyelenggaraan	031	030	030	Profilok Program dan Kegiatan	2	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1

Sumber: Aplikasi ABK 2023

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti ialah adanya data dukung yang kurang jelas seperti berupa hanya berupa *screenshot* website sehingga pemonev merasa kesulitan dalam melakukan validasi isian capaian. Misalnya pada uraian tugas membantu mengerjakan SIP seperti pada gambar berikut.

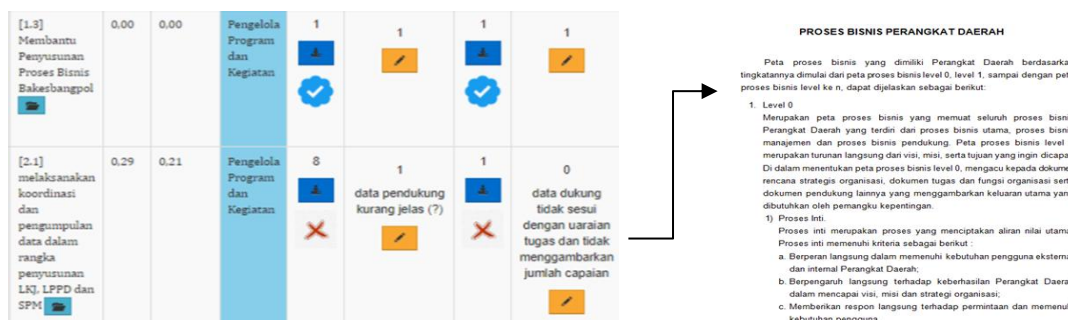
Gambar 2 Contoh Temuan Data Dukung Money ABK



Sumber: Aplikasi ABK 2023

Selain itu terdapat bukti capaian yang digunakan di tupoksi lain sehingga terdapat kesamaan data dukung yang diunggah pada uraian tugas yang berbeda. Misalnya pada uraian tugas membantu penyusunan proses bisnis, namun bukti capaian yang diunggah ialah pekerjaan melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan LKJ, LPPD, dan SPM. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3 Contoh Temuan Data Dukung yang berulang



Sumber: Aplikasi ABK 2023

Berbagai fenomena yang ditemukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bahwa tujuan dari kegiatan monev ABK yang dilakukan oleh pihak Bagian

Organisasi masih belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai kegiatan monev ABK di Bagian Organisasi dengan melihat evaluasi pelaksanaan program monev ABK. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Melalui Aplikasi ABK 2023 pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat fokus yang ditentukan oleh peneliti berguna untuk memberi batasan terhadap suatu objek penelitian agar fokus peneliti tidak melebar.

Fokus penelitian yang digunakan ialah teori pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum menurut Bridgman & Davis (2000) yang meliputi:

1. Indikator *input*
2. Indikator *process*
3. Indikator *outputs* (hasil)
4. Indikator *outcomes* (dampak)

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan memilih narasumber yang paling mengetahui tentang masalah yang diteliti. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ibu Esty Nayadiah, ST, M.Si, M.Sc selaku Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, sebagai koordinator monev ABK di seluruh perangkat daerah.
2. Ibu Reny Elvira Septyandini, S.T selaku pegawai di Sub Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, sebagai pemonev ABK perangkat daerah.
3. Ibu Dra. Katrin Indirayanti, MM selaku Kepala Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian, sebagai koordinator ABK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
4. Bapak Moch. Aminuddin Ali Akbar selaku staf di Bagian Umum dan Kepegawaian,

sebagai

5. Ibu Aldila Wanodya Ratih Puspitasari selaku pegawai di jabatan Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, sebagai pengisi monev ABK

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai kebijakan dan program. Sehingga diperlukan suatu evaluasi sebagai tindak lanjut program, menentukan tujuan program. Evaluasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki atau sebagai alat untuk merubah tujuan program, apakah program tersebut akan menentukan target yang lebih tinggi atautkah menurunkan target atau tujuan program. Pada tahap Evaluasi Program Monev ABK melalui Aplikasi ABK 2023 menggunakan Teori Evaluasi Program menurut pendapat Bridgman dan Davis (2000) terdapat 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1. Indikator Input

Brigman dan Davis (2000) mengemukakan suatu masukan yang memberikan penilaian terhadap sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Indikator ini dapat meliputi latar belakang adanya program, sosialisasi dan sumber daya pendukung, yaitu sebagai berikut:

a. Latar Belakang Program

Suatu kebijakan dapat terbentuk jika terdapat masalah yang terjadi dan adanya tujuan yang dicapai. Bagian Organisasi menggunakan peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan monev ABK di seluruh perangkat daerah. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dalam menyusun analisis beban kerja.

Namun terjadi permasalahan terkait ketidaksinkronan uraian tugas dari nomenklatur jabatan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan bahwasannya terdapat uraian tugas yang masih

belum terwadahi dalam monev ABK dan uraian tugas di monev yang seharusnya bukan menjadi tupoksi dari pegawai. Hal ini dikarenakan penyusunan perencanaan analisis jabatan yang belum optimal, sehingga menyebabkan keseragaman tugas jabatan dan akibatnya jabatan-jabatan yang ada cenderung memiliki uraian tugas yang seragam.

Program monev ABK mengacu pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Bagian Organisasi untuk memudahkan OPD dalam pengisian monev ABK. OPD dapat mengakses aplikasi via website internet dengan memasukkan username dan password sesuai dengan masing-masing akun PD. Terdapat 2 petunjuk teknis yang dapat didownload langsung melalui aplikasi ABK 2023, yaitu petunjuk teknis pengisian form ABK dan petunjuk teknis pengisian monev dengan mengupload data dukung.

b. Sosialisasi Pengisian ABK oleh Bagian Organisasi kepada OPD

Sosialisasi dilakukan secara online melalui *zoom meeting* pada bulan Juni 2023 oleh Bu Esty selaku kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan dibantu oleh staff. Materi yang dijelaskan mengenai tahapan pengisian form aplikasi ABK yang sebelumnya telah dimuat dalam petunjuk teknis. Selain sosialisasi, Bagian Organisasi juga melakukan pendampingan pada masing-masing OPD melalui penyelia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diwakili oleh Bagian Umum dan Kepegawaian mengikuti sosialisasi beserta pegawai lain yang membantu dalam berkoordinasi dengan bidang lain. Selanjutnya sosialisasi tersebut akan disampaikan secara internal di perangkat daerah sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan monev ABK.

c. Sumber Daya Pendukung

a) Sumber Daya Manusia

Dalam monev ABK didukung oleh sumber daya manusia yaitu pegawai di Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang bertugas dalam verifikasi data dukung dengan dibantu oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Program Studi Sarjana Terapan D4 Administrasi Negara. Adapun pegawai yang memonev tidak diberikan pelatihan, namun untuk mahasiswa diberikan sosialisasi mengenai tata cara dalam verifikasi data dukung. Namun penyampaian materi dalam sosialisasi yang diadakan tersebut masih kurang jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya SOP mengenai penilaian yang membuat penilaian tersebut bersifat subjektif dengan bergantung pada penilaian masing-masing pegawai dan mahasiswa sehingga terdapat perbedaan dalam melakukan monev ABK.

Pegawai yang mengisi monev ABK di jabatan Pengelola Program dan Kegiatan berjumlah 1 orang. Pegawai yang menginput telah memahami

langkah-langkah dalam mengisi monev ABK dengan berpedoman pada petunjuk teknis. Namun pegawai merasa kurang memahami terkait petunjuk teknis dan uraian tugas, dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Umum dan Kepegawaian. Pegawai juga tidak diberikan pelatihan, hanya mengikuti sosialisasi dari Bagian Umum dan Kepegawaian mengenai tata cara mengisi ABK.

b) Anggaran Dana

Monev ABK didukung oleh anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan sudah termasuk dalam kegiatan di Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Anggaran tersebut digunakan untuk programmer aplikasi, pegawai kontrak, dan kegiatan monev langsung ke OPD sesuai jadwal yang ditentukan. Anggaran disediakan juga untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti laptop dan jaringan internet.

c) Infrastruktur Pendukung

Bagian Organisasi telah membuat aplikasi ABK 2023 serta menyediakan komputer dan jaringan internet untuk mempermudah pegawai dalam memverifikasi data dukung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop dan jaringan internet yang lancar. Namun terdapat kendala yang dialami oleh pegawai yang mengisi monev ABK yaitu aplikasi ABK 2023 yang pernah mengalami down server sehingga terjadi keterlambatan pengisian monev ABK. Namun keadaan ini tidak sering terjadi, hanya berlangsung selama 1 bulan saja.

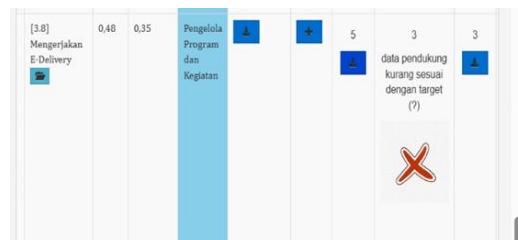
2. Indikator Process

Brigman dan Davis (2000) mengemukakan penilaian mengenai bagaimana sebuah kebijakan dapat dilaksanakan yang diukur dari efektivitas dan efisiensi dari cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan. Indikator process dalam monev ABK diantaranya:

a. Efektivitas

Hal ini dapat dilihat melalui keterlibatan berbagai pihak yang melaksanakan monev ABK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, yaitu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian. Namun masih ditemukan kesulitan terkait petunjuk teknis yang kurang detail dan permasalahan pada beberapa uraian tugas yang dialami oleh pegawai jabatan Pengelola Program dan Kegiatan, yaitu diantaranya:

1) Ketidaksesuaian data capaian dengan data dukung

Gambar 4 Contoh Temuan Data Capaian yang tidak sesuai

Sumber: Aplikasi ABK 2023

Pada uraian tugas mengerjakan *E-delivery*, data dukung yang dilampirkan oleh pegawai tidak menggambarkan jumlah data capaian yang tercantum dalam uraian tugas. Data capaian yang dituliskan oleh jabatan Pengelola Program dan Kegiatan adalah 5, namun hanya melampirkan data dukung 3 berupa *screenshot*. Ketidaksesuaian data capaian dengan data pendukung ini dikarenakan pegawai mengalami kesulitan dalam manajemen waktu dan tidak terhubungnya aplikasi monev ABK dengan aplikasi pada OPD mereka.

2) Spesifikasi data dukung tidak sesuai

Gambar 5 Screenshot Data Dukung Monev ABK

Sumber: Aplikasi ABK 2023

Pada uraian tugas mengerjakan *E-delivery*, pegawai hanya melampirkan data dukung berupa *screenshot* yang tidak menunjukkan rincian uraian tugas. Pemonev melihat total tugas yang dilampirkan berjumlah 5, sedangkan pengisi ABK tidak melihat isi data capaian hanya melihat dari uraian tugas yang telah dilakukan.

Setelah perangkat daerah mengisi monev ABK maka Bagian Organisasi melakukan monev ABK dengan cara memverifikasi data dukung untuk melihat validitas isian ABK sehingga dapat menjaga akurasi data tersebut.

b. Efisiensi

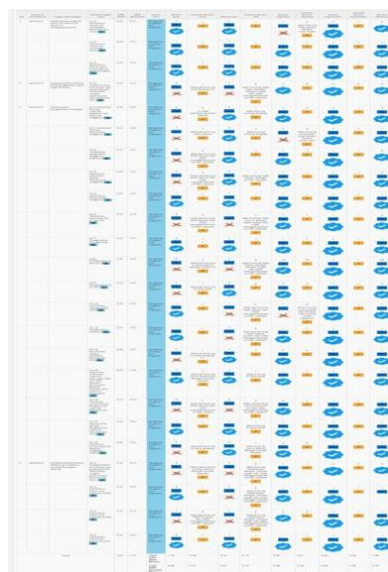
Aplikasi ABK 2023 tidak dibatasi oleh jam kerja sehingga mempermudah pegawai mengupload data dukung. Namun terdapat batas waktu pengunggahan yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi dengan mengirim surat pemberitahuan kepada semua perangkat daerah. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengisian ABK oleh pegawai yang mengisi monev pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan, dimana dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun serta tidak pernah

terlambat selama mengisi monev ABK. Dalam aplikasi ABK juga terdapat kolom komentar yang memuat perbaikan, saran, dan keterangan kesalahan data dukung yang diberikan oleh pemonev.

3. Indikator Outputs

Brigman dan Davis (2000) berpendapat bahwa outputs program merupakan penilaian mengenai apa hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan. Keluaran dari program Monev ABK adalah hasil monev yang berupa data dukung yang telah diverifikasi pemonev sehingga nantinya akan dilihat oleh OPD. Hasil verifikasi data dukung yang benar atau salah tersebut akan digunakan untuk melihat validitas isian ABK, mengetahui gambaran kondisi riil kebutuhan pegawai, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan SKP dan e-Performance. Diketahui bahwa tingkat validitas isian ABK pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan masih belum bisa terpenuhi meskipun banyak data dukung yang sudah benar. Hal ini dikarenakan penilaian data dukung yang masih bersifat subjektif sehingga tergantung pada masing- masing pemahaman pegawai yang memonev. Adapun hasil verifikasi data dukung ialah sebagai berikut.

Gambar 6 Hasil Verifikasi Data Dukung



Sumber: Aplikasi ABK 2023

Hasil verifikasi diatas juga akan digunakan untuk mengetahui kondisi riil kebutuhan pegawai dimana dapat dilihat melalui perhitungan ABK Ideal maupun ABK Berlebih pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan seperti pada gambar berikut.

Tabel 1. Hasil Perhitungan ABK dan Jumlah Pemenuhan Pegawai

Jabatan	ABK Ideal	ABK Berlebih	Pemenuhan Pegawai Saat Ini
---------	-----------	--------------	----------------------------

Pengelola Program dan Kegiatan	1,87	1,36	1
--------------------------------	------	------	---

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan ABK pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia saat ini telah sesuai dengan nilai ABK berlebih yaitu 1 orang pegawai, sehingga pegawai tersebut berhak mendapatkan TPP beban kerja berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya. Namun menurut temuan, terdapat uraian tugas yang belum terwadahi dalam monev ABK sehingga pegawai melakukan pekerjaan di luar tupoksi yang tercantum dalam monev ABK. Sedangkan untuk ABK ideal, jumlah pegawai saat ini tidak sesuai dengan perhitungan ABK berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 sehingga perlu adanya penambahan pegawai menjadi 2 orang sehingga beban kerja dapat sesuai dan seimbang dengan tupoksi yang dikerjakan.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya SKP yang penilaiannya sudah mempertimbangkan untuk menarik uraian tugas yang telah termuat dalam aplikasi ABK, namun masih belum terlaksana untuk e-Performance. Sehingga uraian tugas jabatan yang tertuang dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja harus terjabarkan dengan jelas sehingga penilaian SKP dapat optimal.

4. Indikator Outcomes

Brigman dan Davis (2000) mengemukakan bahwa indikator outcomes (dampak) berfokus mengenai dampak yang diterima oleh instansi yang bersinggungan langsung dengan program. Dalam hal ini terdapat dampak yang diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dan Bagian Organisasi, baik dampak positif maupun negatif yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Positif

- 1) Mendeteksi masalah dini sebagai upaya memperbaiki analisis beban kerja OPD

Monev yang dilakukan setiap bulan memberikan manfaat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait ABK. Permasalahan ini muncul didasarkan pada temua-temuan yang muncul seperti data dukung yang masih salah dikarenakan tidak menggambarkan uraian tugas, tidak sesuai dengan bukti capaian dan tidak mencapai target. Berdasarkan hal tersebut maka ABK perangkat daerah perlu diperbaiki dan disesuaikan. Dengan adanya monev ABK akan mempermudah Bagian Organisasi dalam mengidentifikasi masalah ABK dan mendampingi perangkat daerah dalam memperbaiki ABK tersebut.

b. Dampak Negatif

- 1) Ketidakseimbangan Beban Kerja

Adanya monev ABK mengharuskan pegawai membuat bukti data dukung yang harus diunggah setiap bulan, namun terdapat uraian tugas yang tidak dicantumkan dalam aplikasi ABK. Sehingga membuat pegawai harus melakukan pekerjaan tersebut bersamaan dengan monev. Selain itu penambahan tupoksi yang diberikan pimpinan juga menambah beban kerja pegawai. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan adanya pemberian pekerjaan ke pegawai lain sehingga terjadinya ketidakseimbangan beban kerja.

2) Beban Administratif yang tinggi

Pegawai pengisi ABK merasa terbebani karena harus mengunggah banyak sekali tugas secara rutin. Terdapat banyak website yang perlu diisi oleh pegawai sehingga pengisian ABK tidak hanya untuk monev, akhirnya pegawai harus melakukan pengisian berkali-kali. Adanya hal tersebut maka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pengisian. Dengan demikian adanya monev ini memberikan dampak beban administrasi kepada pegawai yang mengisi ABK.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program monitoring dan evaluasi analisis beban kerja melalui aplikasi ABK 2023 pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya peraturan atau regulasi yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan monev ABK. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dana, dan sarana prasarana menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan program monev ABK. Selain itu hasil monev ABK yang telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan telah menunjukkan hasil yang baik, dimana nantinya akan digunakan untuk melihat validitas hasil isian ABK perangkat daerah, mengetahui gambaran kondisi riil kebutuhan pegawai, dan sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian SKP dan e-Performance.

Adanya monev ABK ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dan Bagian Organisasi. Namun dalam pelaksanaan monev ABK, sosialisasi yang dilakukan antara pegawai Pengelola Program dan Kegiatan dengan Bagian Umum dan Kepegawaian masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu tidak adanya SOP dalam verifikasi data dukung monev oleh pemonev membuat penilaian berifat subjektif dikarenakan tergantung pada masing-masing pemahaman pegawai yang memverifikasi hasil monev ABK.

Dengan adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan monev ABK, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menjadi alternatif dalam membantu meminimalisir hambatan, yaitu diantaranya: pemonev mengoptimalkan peran penyelia untuk ikut mendampingi tindak lanjut hasil temuan, sehingga perhitungan ABK

dapat menghasilkan hasil yang valid; perlu adanya perbaikan ABK pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan dengan menambah uraian tugas dan perhitungan ABK baru yang kemudian diusulkan kepada Bagian Organisasi; menyamakan persepsi antara pegawai yang memonev terkait ketentuan bukti data dukung dengan cara menetapkan ketentuan yang jelas dan disepakati bersama sehingga hasil verifikasi dan validasi hasil monev dapat objektif; dan menyediakan instrumen seperti survey dan berita acara agar mengetahui kasus terkait hasil temuan ABK PD sehingga dapat terlihat lebih jelas dan rinci.

Referensi

- Arischa. 2019. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*: 6 (1): (8)
- Badan Kepegawaian Negara. (2021). Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN. *Peraturan BKN*, 845.
- Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW
- Dzulqarnain, G., Meigawati, D., & Basori, Y. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 109–116. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2505>
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Masram, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher. <https://anyflip.com/vosfx/puhx/basic>
- Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.
- Permenpan. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan*. 1–46.
- Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (2021). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya*.